

BULETIN

BIOENERGI

Edisi Agustus 2018

www.aprobi.or.id



**PENGGUNAAN BIODIESEL
DIPERLUAS**

Penanggung Jawab
Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia
(APROBI)

Dewan Redaksi
Pengurus APROBI

Alamat Redaksi
Multivision Tower, Lantai 11,
Jl Kuningan Mulia Lot 9B

Buletin ini diterbitkan oleh
Asosiasi Produsen Biofuels
Indonesia (APROBI)



Redaksi menerima kiriman artikel
opini, naskah berita, foto, dan
kartun. Naskah bisa dikirimkan
melalui pos ke Alamat Redaksi atau
melalui email office@aprobi.or.id
Redaksi berhak mengedit dan
mengubah tulisan tanpa mengubah
makna dari tulisan tersebut.

Biofuelpedia

Harga Indeks Pasar (HIP) BBN
adalah harga jenis Biodiesel yang
dicampurkan ke dalam Jenis Bahan
Bakar Minyak Tertentu (solar)
didasarkan pada harga publikasi
Kharisma Pemasaran Bersama
Nusantara untuk Crude Palm Oil
(CPO) unit Belawan dan Dumai
rata-rata periode 1 (satu) bulan
sebelumnya. Tidak termasuk Pajak
Pertambahan Nilai ditambah
besaran konversi CPO menjadi
Biodiesel sebesar 125 USD/MT
(seratus dua puluh lima dolar
Amerika Serikat per metrik ton)
dengan faktor konversi sebesar
870 kg/m³. Besaran HIP BBN
itu ditetapkan setiap bulan dan
dilakukan evaluasi paling
sedikit 6 bulan sekali oleh
Direktur Jenderal EBTKE

BIODIESEL PENYELAMAT DEVISA NEGARA

Pembaca yang terhormat,

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menerbitkan buletin Bioenergi pada bulan kedelapan pada 2018. Buletin yang mulai dipublikasikan pada pertengahan tahun 2016 ini menginformasikan perkembangan terkini di industri biodiesel dan pada umumnya industri sawit.

Rubrik Laporan Utama, mengangkat rencana pemerintah memperluas penggunaan biodiesel. Mandatori akan diwajibkan kepada pemakaian non Public Service Obligation (PSO). Rencana ditujukan membantu pemerintah untuk penghematan devisa negara. Rata-rata devisa yang diselamatkan mencapai Rp 300 miliar atau sekitar US\$ 21 juta per hari. Ditengah ketidakpastian ekonomi dunia dan meroketnya impor BBM, langkah ini pemerintah sebaiknya mendapatkan dukungan semua pihak. Karena pemakaian biodiesel akan berdampak luas kepada industri dan petani sawit. Kemampuan ini sudah teruji di saat tahun 2015 lalu, setelah mandatori B20 resmi berjalan untuk sektor subsidi. Kini tinggal, kita lihat dukungan dan komitmen pemangku kepentingan lain

untuk mempermudah akselerasi biodiesel.

Rubrik Sosok mengulas profil Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian RI, yang berkomitmen kuat mendukung pertumbuhan industri di dalam negeri termasuk hilir sawit. Latar belakangnya sebagai pelaku industri membuat dirinya memahami peta persoalan sektor industri di Indonesia. Tak heran, dia mampu mendorong sektor industri di Indonesia.

Pembaca, kami harapkan buletin Bioenergi membantu penyebaran informasi positif mengenai peranan biodiesel kepada negara ini, sehingga dukungan masyarakat terhadap industri biodiesel dapat terus meningkat dan memahami pentingnya kehadiran industri bioenergi. Selamat membaca.



MENKO DARMIN: KONSUMSI B-20 HEMAT DEvisa RP 79,2 TRILIUN

JAKARTA - Penggunaan biodiesel campuran 20% atau B-20 dapat menghemat devisa negara dari pembelian solar. Devisa yang dapat dihemat mencapai Rp302,4 miliar per hari atau sekitar US\$ 21 juta per hari (kurs Rp14.400 per US\$).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan bahwa penggunaan B-20 dapat menghemat cadangan devisa hingga US\$5,5 miliar atau setara Rp79,2 triliun (kurs Rp14.400 per USD). Syaratnya adalah pemakaian B20 dijalankan sepenuhnya oleh sektor kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) dan non PSO.

Dikatakan Menko Darmin melanjutkan, penggunaan campuran biodiesel sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Sementara persentase penggunaan biodiesel 20% sebagai campuran solar mengacu kepada Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati



Kendati demikian, regulasi ini hanya mengatur penggunaan B-20 pada PSO. Saat ini, pemerintah tengah merevisi beleid untuk nantinya penggunaan B20 juga diwajibkan bagi non PSO. "Kami harapkan revisi dapat berjalan dalam dua hingga tiga bulan ini," tegas Darmin.

Pemerintah memberikan masa transisi bagi pelaku industri untuk nantinya menggunakan B20 sebagai bahan bakar. "Bagaimana transisinya dan teknisnya kita masih akan duduk dulu. Termasuk dengan industrinya," tutup dia. (*)

KEMENTERIAN PERDAGANGAN LOBI BOEING, PAKAI BIOAVTUR DI PESAWAT TERBANG



JAKARTA - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita bertemu Vice President of International Government Relation Boeing, Mark Lippert, untuk membahas penggunaan bahan bakar pesawat berbasis sawit (Bioavtur). Bahan bakar tersebut merupakan pengembangan dari Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI).

Dalam pertemuan yang dilakukan saat kunjungan Menteri Perdagangan RI ke Amerika Serikat, Enggartiasto menjelaskan bahwa Indonesia ingin meningkatkan kemitraan strategis dan menyeimbangkan hubungan perdagangan kedua

negara di berbagai sektor.

Menurut Enggar, dirinya mewakili Pemerintah Indonesia menyampaikan keinginan untuk meningkatkan kemitraan strategis kedua negara.

"Kami mengajak Boeing bukan hanya untuk menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi agar dapat bersama-sama menjadi bagian dari strategi masa depan yang saling menguntungkan. Banyak terdapat potensi kerja sama dengan Indonesia, misalnya pengembangan bahan bakar pesawat biofuel (bioavtur) berbasis sawit, suku cadang pesawat, serta layanan perawatan, perbaikan, dan overhaul (maintenance, repair, overhaul/MRO)," ujar Menteri dalam siaran pers, Selasa, (24 Juli 2018).

Terkait dengan penawaran kerja sama bioavtur berbasis sawit, Pemerintah Indonesia memfasilitasi pertemuan antara Boeing dan Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI) yang telah mengembangkan biofuel dan ekspor secara global.

"Boeing bersama pelaku usaha Indonesia dapat bekerja sama mengembangkan bioavtur berbasis minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan," kata Mendag Enggar.

UNI EROPA TETAP GUNAKAN BIODIESEL



Diplomasi Menko KEMARITIMAN LUBUK PANJAITAN dalam Seminar "Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pertanian dan Perkebunan Demi Perdamaian dan Kemanusiaan", di Roma, Italia, Mei 2018

Keputusan Uni Eropa yang menunda larangan penggunaan biofuel berbasis sawit sampai 2030 memberikan angin segar bagi produsen biodiesel. Penundaan ini tetap harus diwaspadai sambil menjalankan perbaikan tata kelola sawit di Indonesia .

Otoritas Uni Eropa memutuskan untuk menunda penghapusan (phase out) sawit sebagai sumber biofuel menjadi 2030. Sebelumnya, parlemen Uni Eropa mengusulkan tidak ada lagi penggunaan sawit oleh industri biofuel pada 2021. Keputusan ini hasil kesepakatan pertemuan trilog antara Komisi Eropa, Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa pada 14 Juni 2018 yang juga menghasilkan revisi Arahan Energi Terbarukan Uni Eropa (RED II).

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend, dalam keterangan resmi, menjelaskan bahwa Uni Eropa memimpin dalam upaya melawan perubahan

iklim. Kesepakatan yang dicapai dalam merevisi Arahan Energi Terbarukan Uni Eropa (RED II) mencakup pengurangan bertahap dari sejumlah kategori biofuel (bahan bakar nabati) tertentu yang turut dihitung untuk memenuhi target energi terbarukan kami yang ambisius.

"Biofuel akan dikaji dengan perlakuan yang sama, tanpa melihat sumbernya. Teks RED II tidak akan membedakan, atau melarang minyak sawit. Uni Eropa merupakan dan tetap akan menjadi pasar paling terbuka untuk minyak sawit Indonesia," jelas Vincent.

Dalam perspektif pemerintah Indonesia, keputusan Uni Eropa

ini diharapkan tidak sebatas penundaan melainkan pencabutan secara keseluruhan. Selain itu, ada perlakuan sama yang dijalankan Uni Eropa kepada produk minyak nabati lain di luar sawit. Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita, mengungkapkan ketidakpuasannya atas perpanjangan waktu Uni Eropa terhadap produk sawit. Harapan pemerintah adalah Uni Eropa mencabut larangan penghapusan produk sawit untuk biofuel.

"Kendati dilakukan pengunduran dari 2021 menjadi 2030, tapi kita tetap persoalkan. Seandainya kita membatasi penggunaan Airbus sampai 2030 itu juga tidak enak kan. Atau kita

“Kami minta kepada pemerintah diupayakan dalam studi (Komisi Eropa), baik Indonesia dan Malaysia bisa terlibat. Jika tidak dilibatkan, hanya mereka (Eropa) yang buat studi. Ini berpotensi hasilnya kurangimbang,”

Paulus Tjakrawan // Ketua Hutan APROBI

bilang wine Eropa sampai 2030 sama juga tidak baik,” ungkapnya.

Master Parulian Tumanggor, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI) merasa gembira atas keputusan otoritas Uni Eropa tersebut. “Pertama, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Presiden beserta jajaran kabinet untuk melakukan lobi dan menolak diskriminasi atas biofuel berbahan baku sawit di Eropa,” kata Tumanggor.

Sebelum adanya pertemuan Trilog Uni Eropa, Presiden Jokowi dan jajaran menteri Kabinet Kerja sangat aktif menggalang lobi dan diplomasi. Dalam berbagai pertemuan dengan pemimpin negara asal Uni Eropa, Presiden Jokowi menekankan penolakan atas diskriminasi sawit. Pada pertengahan Mei 2018, Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan menghadiri seminar di Vatikan mengenai “Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pertanian dan Perkebunan Demi Perdamaian dan Kemanusiaan”.

Bagi pelaku usaha, perpanjangan waktu ini dapat digunakan secara maksimal untuk memperkuat tata kelola sektor hulu dan hilir sawit. Tumanggor menyebutkan selama penundaan ini maka Indonesia punya kesempatan untuk ekspor ke Eropa. Selain itu, pelaku industri yang memanfaatkan biodiesel di luar negeri juga bergembira atas putusan ini. “Dengan masa jeda ini cukup

bagi kita untuk melakukan langkah perbaikan baik di hulu dan hilir dalam rangka menuju industri sawit yang *sustainable*. Meskipun masih bergantung kepada studi Komisi Eropa pada 1 Februari 2019,” ujarnya.

Studi Komisi Eropa

Salah satu point penting dalam keputusan Trilog Uni Eropa pada Juni kemarin, mengenai studi ilmiah untuk menjadi bahan pelaporan bagi otoritas setempat pada 2020. Nantinya, Komisi Eropa ditugaskan memberlakukan *Delegated Act* untuk menetapkan bahan baku yang mengalami ekspansi area produksi secara signifikan dari lahan dengan stok karbon tinggi.

Paulus Tjakrawan, Ketua Harian APROBI, menuturkan asosiasi sedang mempelajari apakah di dalam keputusan tersebut terdapat kebijakan yang berpotensi diskriminasi atau merugikan produk biodiesel. “Antara tahun 2030, palm oil akan dihapus sebagai sumber bahan baku biofuel. Jika yang lain (minyak nabati) tidak dihapus maka berpotensi diskriminasi,” tambahnya.

Walaupun diundur, pelaku usaha dan pemerintah diminta mewaspadaikan studi Komisi Eropa yang diterbitkan pada Februari 2019. Paulus menjelaskan studi Eropa terkait sawit akan melihat tiga aspek yaitu deforestasi, Indirect

Land Use Change (ILUC), dan tenaga kerja. Hasil studi inilah yang akan dipakai menjadi dasar langkah Uni Eropa di tahap berikutnya 2020, itu sebabnya studi ini diperkirakan akan selesai pada 2019.

“Kami minta kepada pemerintah agar diupayakan dalam studi (Komisi Eropa), baik Indonesia dan Malaysia bisa terlibat. Jika tidak dilibatkan, hanya mereka (Eropa) yang membuat studi. Ini berpotensi hasilnya kurangimbang,” ujar Paulus Tjakrawan.

Senada dengan Paulus Tjakrawan, Oke Nurwan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia ingin terlibat aktif dalam penyusunan studi Komisi Uni Eropa. Tujuannya adalah Indonesia dapat memberikan pemahaman terkait sawit dan memastikan tidak terjadi diskriminasi.

Oke menjelaskan bahwa harus tetap diperhatikan pergeseran kriteria terhadap produk sawit. Untuk itu, jangan sampai ada kriteria yang mendiskriminasi palm oil. “Jangan sampai kemasannya diskriminasi tidak ada tapi dari kriteria itu ternyata mendiskriminasi palm oil,” jelas Oke seperti dilansir dari media nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode 2013–2016 ekspor biodiesel Indonesia ke UE turun sebesar 42,84%, dari US\$ 649 juta pada tahun 2013 turun menjadi US\$ 150 juta pada tahun 2016. Nilai ekspor biodiesel Indonesia ke UE paling rendah terjadi di tahun 2015 yaitu hanya sebesar US\$ 68 juta. Kementerian Perdagangan RI memproyeksikan nilai ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa diperkirakan mencapai US\$ 386 juta pada 2019, dan pada tahun 2022 akan mencapai US\$ 1,7 miliar. (*)



PERLUASAN BIODIESEL, HEMAT DEVISA NEGARA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta percepatan implementasi biodiesel untuk menghemat devisa dan perbaikan neraca perdagangan. Sejumlah kementerian mengusulkan perluasan penggunaan B20 kepada sektor non PSO.

Pada akhir Juli 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan beberapa menteri Kabinet Kerja untuk membahas pengurangan energi fosil dan percepatan biodiesel. Dalam Rapat Terbatas yang bertemakan Percepatan Pelaksanaan Mandatori Biodiesel, Presiden mengkritisi penggunaan energi fosil yang masih sangat dominan dari bauran energi nasional.

"Kita tidak boleh hanya tergantung pada energi fosil semata, karena suatu saat energi fosil akan habis," kata Presiden Jokowi.

Menurutnya, percepatan penggunaan biodiesel dan energi baru terbarukan itu sudah

beberapa kali dibicarakan. Namun, implementasinya di lapangan belum sesuai yang diharapkan. Presiden punya alasan kuat mengapa terus menekankan masalah ini dan akan memantaunya, karena menyangkut perbaikan neraca perdagangan Indonesia.

"Ini penting sekali, kita juga ingin mengurangi impor minyak. Artinya, juga akan menghemat devisa, ada penghematan devisa di sini," tegas Presiden.

Perhitungan Presiden Jokowi, kalau penggunaan biodiesel dan energi terbarukan itu betul-betul bisa diimplementasikan, maka akan hemat kurang lebih US\$21 juta dolar per hari. Oleh sebab itu, Presiden menegaskan, dirinya

akan terus mengikuti dan melihat angka-angka implementasi pelaksanaan mandatori biodiesel ini.

Presiden juga mengharapkan supaya mandatori disiapkan secara detail dari hulu sampai hilir, sehingga implementasi ini menghasilkan sesuatu yang baik. "Tidak kalah pentingnya adalah memastikan keamanan dan keandalan biodiesel sebagai bahan bakar alternatif, sehingga penggunaan biodiesel semakin meningkat dan luas," sambung Presiden.

Dalam Rapat Terbatas ini hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Hukum dan HAM Yasonna M. Laoly Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Kepala BKPM Thomas

Lembong, dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana.

Setelah rapat usai, beberapa menteri terkait menyampaikan bahwa Indonesia siap mempercepat pemakaian biodiesel. Menteri Perindustrian RI, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah akan memperluas implementasi campuran minyak sawit 20% di bahan bakar solar atau B20 untuk semua kendaraan bermotor.

"Untuk itu, pemerintah akan buat revisi Perpres yang mencakup non PSO. Dalam rapat terbatas, Non PSO tadi disampaikan jumlahnya ada 16 juta (ton). Berarti, ada penambahan *demand* biofuel 3,2 juta ton per tahun. Teknis akan dibahas berapa lama bisa dicapai," kata Airlangga.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan bahwa pemerintah akan mewajibkan penggunaan B20 tetapi proses transisi tidak bisa serta-merta. Dengan melihat perkembangan sekarang, Menko Darmin optimis penerapan kebijakan biodiesel 30% (B30) dapat berjalan pada 2020. Asalkan mendapatkan dukungan penuh dalam penggunaan teknologi biodiesel yang lebih maju.

Pemerintah berencana menerapkan uji jalan (*road test*) penggunaan B30 untuk transportasi darat pada Agustus sampai Desember 2018. Alhasil, pelaksanaan B30 dapat diterapkan pada Januari 2019.

Untuk memperluas penggunaan B20, pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Menurut Menko Darmin, ada beberapa pasal di dalam perpres yang akan diubah untuk menjelaskan skema penggantian selisih Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati untuk sektor non-PSO kepada badan usaha swasta.

Dukungan terhadap biodiesel datang dari sektor listrik. Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan bahwa pemerintah berupaya mengoptimalkan PT PLN (Persero) untuk mengganti seluruh Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menggunakan 100% minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar.

Dari data sekarang, jumlah kapasitas PLTD yang dioperasikan oleh PLN tercatat sekitar 3.200 megawatt (MW). Menurut Jonan, untuk pembangkit sebanyak 3.200 MW, konsumsi CPO diperkirakan dapat mencapai 4,5 juta-5 juta kilo liter.

Menurut Jonan, jika seluruh PLTD berbahan bakar sawit akan membantu kenaikan bauran energi baru terbarukan yang cukup signifikan. "Kalau bisa dilakukan itu dalam 5 tahun. EBT nambahnya 5% dari kapasitas sekarang," ujar Jonan pada pertengahan Juli 2018.

Menurut Ignasius Jonan, seharusnya tidak ada kendala bagi pembangkit listrik untuk memakai campuran 100% minyak sawit sebagai bahan bakar. Karena saat ini sudah cukup banyak teknologi yang bisa mendukung pengimplementasian rencana tersebut.

"Teknologi ada. PLN juga sudah buat, GE bisa, yang lain juga bisa kok. Jadi tinggal kita implementasikan pelan-pelan, ya 5-10 tahun lah," katanya seperti dilansir dalam laman *bisnis.com*. Selain meningkatkan bauran energi EBT, solusi ini akan membantu penyerapan produksi CPO dalam negeri.

Niatan pemerintah mempercepat dan memperluas pemakaian biodiesel sangatlah beralasan karena impor solar terbilang tinggi tahun ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Sepanjang Januari-Juni 2018 impor migas mencapai US\$ 8,05 miliar, naik dari periode sama tahun lalu US\$ 7,25 miliar. Tingginya impor berakibat kepada defisit neraca perdagangan hasil minyak melonjak dari US\$ 6,41 miliar menjadi US\$ 7,22 miliar.



"Kami siap mendukung dan memasok biodiesel untuk membantu program pemerintah,"

MP Tumanggor // Ketua Umum APROBI

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) menyatakan kesiapan mendukung kebijakan pemerintahan Joko Widodo untuk mempercepat mandatori biodiesel. Mengingat kebijakan ini membantu menekan impor bahan bakar minyak serta menghemat devisa. "Kami siap mendukung dan memasok biodiesel untuk membantu program pemerintah," kata Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor.

Tumanggor menyebutkan apabila kebijakan itu benar-benar diterapkan maka serapan dari CPO (minyak kelapa sawit mentah) yang diproduksi banyak di daerah juga akan terserap. Saat ini, kapasitas terpasang pabrik biodiesel yang ada mencapai 12 juta kiloliter (kl). Dengan perluasan mandatori B20 kepada sektor non PSO, maka kapasitas yang terpakai baru 6 juta kl.

Tumanggor menyebutkan produsen biodiesel sangat siap untuk pasokan dalam negeri. Kalaupun program B30 terealisasi, dari perhitungan asosiasi maka utilisasi kapasitas baru 9 juta kl. "Dari sisi kapasitas produksi yang sudah ada sekarang. Maka ke depan yang diperlukan bersaing efisiensi dan terintegrasi," pungkasnya. (*)

Pelaksanaan mandatori biodiesel campuran 30% atau B30 mendapatkan dukungan dari industri otomotif. Kendati demikian, ada sejumlah prasyarat supaya mandatori berhasil. Salah satunya mensyaratkan uji coba di kendaraan standar Euro 4.

Dalam sebuah diskusi di akhir Juli 2018, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) mengungkapkan dukungannya terkait penerapan mandatori bahan bakar solar dengan campuran biodiesel berbasis sawit sebesar 30 persen atau dikenal B30 pada 2020. Syaratnya adalah bahan bakar yang ada di lapangan sesuai standar dan ketentuan pemerintah.

Dalam penerapan biodiesel selama ini, kendaraan pengguna solar dibagi menjadi tiga yaitu usaha kecil (perikanan, pertanian), transportasi non PSO, dan transportasi PSO yang menjadi pengguna biosolar dari April 2015. Sementara itu, bagi pengguna transportasi non (PSO) mungkin tidak mau karena kualitas bahan bakarnya kurang bagus bagi mesin kendaraan.

Kalangan produsen otomotif meminta pemerintah supaya menggelar uji jalan kendaraan berbahan bakar biosolar. Menurut Johannes Nangoi, uji jalan kendaraan ini sebaiknya berlangsung hingga satu tahun supaya diketahui hasil penggunaan biosolar terhadap kendaraan. "Jadi, ujicoba ini tidak bisa sebatas satu atau dua kilometer karena masing-masing merek (kendaraan) memakan waktu yang berbeda. Ada yang minta 100 ribu kilometer,



INDUSTRI OTOMOTIF USULKAN SYARAT PENERAPAN B30

bahkan 500 ribu kilometer,"kata Johannes.

Jenis mobil yang digunakan uji coba tidak bisa sembarang mobil. Dijelaskan Nangoi, kendaraan uji coba tidak bisa menggunakan mobil yang saat ini sudah diproduksi di Indonesia dengan standar emisi gas buang Euro 2. "Sementara itu, kalau menggunakan mobil sekarang ini. Begitu selesai uji jalan, aturannya mengarah kepada standar Euro 4," ujar Nangoi.

Yang menjadi persoalan adalah industri otomotif Indonesia belum ada yang memproduksi mobil

Euro 4. Itu sebabnya, apabila ujicoba ingin dijalankan tahun ini sebaiknya pemerintah membeli mobil dari luar negeri.

Usulan GAIKINDO ini mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O, Nangoi menyebut produksi mobil di dalam negeri sudah dijadwalkan masuk ke level Euro 4.

Berdasarkan kesepakatan anggota GAIKINDO, sudah



dibuat jadwal terencana untuk menghasilkan kendaraan standar Euro 4. "Dari jadwal kami untuk kendaraan Euro 4 bahan bakar bensin pada 1 September 2018. Sementara, bahan bakar solar dijadwalkan 1 Januari 2021," kata Nangoi.

Senada dengan industri otomotif. Wakil Ketua Bidang Industri dan Logistik Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptringdo) Kyatmaja Lookman menurkan pelaku industri transportasi meminta sosialisasi yang berkelanjutan terhadap penggunaan biosolar karena mesin yang dipakai sekarang untuk campuran B5 dan B10.

Menurut Kyatmaja Lokman, ada tiga kendala yang dihadapi dalam penggunaan B20 selama ini antara lain waktu servis yang lebih cepat, biaya operasional membengkak karena konsumsi biosolar yang dituding lebih boros, dan potensi

kerusakan mesin. "Mesin-mesin standar yang beroperasi sekarang itu masih B10," kata Kyatmaja Lookman seperti dilansir dari *LKBN Antara*.

Kyatmaja menambahkan bahwa penggunaan biosolar membuat kandungan air lebih tinggi sehingga membutuhkan komponen tambahan berupa water separator di mobil. Tingginya kandungan air berimbas kepada perawatan kendaraan dari semula setiap 10.000-20.000 kilometer menjadi sekitar setiap 5.000-7.000 kilometer harus servis.

Berdasarkan data asosiasi, dari 6,2 juta truk yang beredar, sebanyak 4,3 juta truk sudah berusia tua sehingga membutuhkan perawatan ekstra. Menurutnya berdasarkan sebuah pengujian, penggunaan B20 lebih boros 2,3 persen ketimbang mengonsumsi solar biasa.

Dari kalangan pemerintah yang diwakili Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan bahwa pelaksanaan uji jalan atau road test penggunaan campuran biodiesel 30 persen (B30) ditargetkan mulai Agustus sampai Desember 2018.

"B30 kalau lihat roadmap memang 2020 dan road test 2019. Tapi karena kondisi neraca perdagangan defisit dan meningkatkan ketahanan energi, maka B30 akan dipercepat," ujar Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal (Ditjen) Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi



"Uji jalan kendaraan ini sebaiknya berlangsung hingga satu tahun supaya diketahui hasil penggunaan biosolar terhadap kendaraan"

Johannes Nangoi // Ketua Umum GAIKINDO

Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Andriah Feby Misnah dalam rapat koordinasi persiapan uji penerapan B30 di Kantor Ditjen EBTKE, Jakarta, Rabu, 25 Juli 2018, seperti dilansir dari *tempo.co*.

Kegiatan uji coba akan menempuh jarak 40 ribu kilometer (km) dengan rute Serpong-Tol Jagorawi-Puncak-Cianjur-Padalarang-Cileunyi-Bandung-Lembang-Subang-Cikampek-Pamanukan-Karawang-Cibitung-Serpong.

Paulus Tjakrawan, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), pihaknya ingin membantu negara supaya mandiri dari sektor energi mengurangi emisi gas. Dan, menyambut baik tawaran dari GAIKINDO jika ada yang kurang baik mari bekerjasama dan memperbaiki apabila kualitas Biodiesel masih dianggap kurang maka perlu diperbaiki.

APROBI juga berkomitmen dengan penggunaan biodiesel akan mendorong untuk peningkatan produktivitas perkebunan sawit. Dan, berkomitmen produksi B30 sesuai dengan ketentuan pemerintah dan suplai untuk biodiesel.

"Untuk energi terbarukan memang harus dikejar dan sepanjang 12 tahun, kita juga terus meningkatkan kualitas. Biodiesel kita tidak kalah dengan Eropa. Buktinya kita masih bisa ekspor ke Eropa," pungkas Paulus. (*)

INDUSTRI HILIR SAWIT KIAN CEMERLANG



Tiga asosiasi industri hilir sawit APROBI, GIMNI, dan APOLIN mengadakan buka puasa dan silaturahmi bersama kalangan jurnalis, pada Mei 2018

Industri produk turunan sawit tetap menjanjikan dengan dukungan berbagai faktor seperti kenaikan permintaan dari dalam dan luar negeri. Data menunjukkan industri hilir sawit untuk sektor minyak nabati, oleokimia, dan biodiesel tahun ini tumbuh positif.

Pada 2018, konsumsi minyak sawit di dalam negeri dapat menyentuh angka 12,759 juta ton, lebih tinggi dari tahun lalu yang sebanyak 11,056 juta ton. Di dalam negeri, konsumsi CPO domestik digunakan lebih dominan kepada industri pangan. Dengan rincian, sebanyak 8,414 juta ton untuk makanan dan specialty fats. Sementara itu, 845 ribu ton untuk oleochemical dan soap noodle. Lalu, 3,5 juta ton memenuhi kebutuhan biodiesel.

"Industri hilir sawit tetap menarik di tahun ini baik untuk sektor minyak nabati, oleokimia, dan biodiesel," kata Sahat Sinaga Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dalam kegiatan buka puasa dan silaturahmi bersama media dengan tiga asosiasi yaitu GIMNI, APROBI, dan APOLIN, di Jakarta, pada akhir Mei 2018.

Sahat mengatakan ada sejumlah faktor yang mendukung pertumbuhan positif industri hilir yaitu produk biodiesel tidak lagi dibebani tarif tinggi oleh Uni Eropa, diplomasi dagang pemerintahan Joko Widodo yang sangat aktif, tindakan retaliasi

USA dengan sejumlah negara seperti Tiongkok, Meksiko maupun Uni Eropa, dan menguatnya kurs mata uang Amerika Serikat. "Faktor inilah yang membawa angin segar bagi perdagangan sawit di pasar global," kata Sahat.

Paulus Tjakrawan, Ketua Harian APROBI menuturkan tahun ini pemakaian biodiesel di dalam negeri naik sekitar 500 ribu. Kenaikan ini dapat terealisasi asalkan penggunaan biodiesel non-subsidi dapat berjalan. Ditambah dengan pemakaian biodiesel untuk campuran bahan bakar kereta api dan alat berat pertambangan. Selain itu, kemenangan Indonesia berkaitan kebijakan anti dumping Uni Eropa di sidang WTO juga memberikan angin segar.

Oleokimia

Di tempat yang sama, Rapolo Hutabarat, Ketua Umum APOLIN, memproyeksikan volume ekspor produk oleokimia tumbuh 22% menjadi 4,4 juta ton, dibandingkan tahun lalu berjumlah 3,6 juta ton. Peningkatan ekspor oleokimia ditopang tren kenaikan konsumsi

global produk oleokimia di sektor kosmetik, industri, ban, dan pengeboran minyak.

Di dalam negeri, menurut Rapolo, kegiatan ekspor semakin menarik karena ada investasi baru oleokimia seperti PT Energi Sejahtera Mas dan Unilever. Seluruh faktor ini yang menopang pasokan industri oleokimia Indonesia ke pasar dunia. Nilai ekspor produk olekimia mencapai US\$ 3,3 miliar pada 2017.

"Tahun ini, kami perkirakan nilai ekspor naik menjadi 3,6 miliar dolar. Sampai triwulan pertama, volume ekspor oleokimia 1,1 juta ton dengan nilai perdagangan 915 juta dolar," kata Rapolo.

Minyak goreng

Di segmen minyak goreng, produk minyak goreng curah akan beralih kepada kemasan. Sahat Sinaga memperkirakan proses transisi ini akan selesai pada 2019. "Nanti tahun 2020 tidak ada lagi minyak goreng yang dijual curah," jelasnya.

Saat ini, pelaku industri minyak goreng menjalankan proses transisi dari proses produksi minyak goreng curah ke kemasan.

Transisi dari minyak curah ke kemasan, dijelaskan Sahat, akan berdampak kepada harga. Sebab, pelaku industri mengalokasikan investasi mulai dari mesin untuk pengemasan, ruang penyimpanan yang lebih besar, termasuk kotak (kardus) kemasan luar, dalam proses tersebut.

Menurut Sahat, kegiatan transisi ini akan meningkatkan investasi pengemasan migor, karena pada tahun depan perusahaan akan sibuk membeli mesin filling. Dengan total volume 3,50 miliar kilogram minyak goreng curah yang dialihkan ke kemasan, katakanlah untuk 500 milliliter per kemasan akan dibutuhkan sekitar 1.850 unit mesin. Dengan harga sekitar Rp 600 juta per unit mesin berarti bakal ada investasi triliunan rupiah," kata Sahat Sinaga. (*)

Kementerian Perindustrian RI berupaya meningkatkan daya saing produk sawit di pasar global. Saat ini, industri hilir sawit berjalan positif dalam tiga tahun terakhir.

Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian RI, mempunyai visi dalam pembangunan sektor industri dan manufaktur di Indonesia. Salah satu gagasannya memperluas penggunaan biodiesel campuran 20% atau B-20 kepada sektor non subsidi seperti alat berat di industri tambang dan kendaraan lainnya. Sebelumnya B20 dalam konsumsi solar hanya diwajibkan kepada kendaraan bersubsidi atau *public service obligation* (PSO) seperti kereta api dan unit otomotif.

Dijelaskan Airlangga bahwa perluasan ini akan diikuti dengan merevisi Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Sebab, beleid ini hanya mengatur kewajiban penggunaan B-20 untuk kendaraan bersubsidi.

Menurutnya, pasokan bahan baku CPO Indonesia masih mencukupi bahan baku untuk produksi biodiesel, yakni CPO (minyak sawit mentah). "Kapasitas CPO nasional mencapai 38 juta ton pada tahun 2017. Sebanyak 7,21 juta ton di antaranya untuk keperluan ekspor dan kebutuhan pangan nasional sebesar 8,86 juta ton," ungkapnya.

Sebelum menjabat Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto sudah dikenal memiliki pemahaman yang baik terhadap dunia perindustrian dan ekonomi. Pria kelahiran Surabaya, 1 Oktober 1962 ini sudah malang melintang baik dalam dunia politik dan bisnis. Tidak heran apabila Presiden Joko Widodo menempatkan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian.

Dalam pandangan Airlangga, Indonesia telah siap meningkatkan penggunaan biodiesel sampai 100% atau B-100. Saat ini, sudah ada teknologi untuk *biofuel* 100%, dan teknologi yang



Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian

MENDORONG DAYA SAING PRODUK HILIR SAWIT

sama dengan *fuel oil*. Sehingga tidak mengganggu kondisi teknis dari kendaraan bermotor ataupun pembangkit dan yang lainnya. Dengan demikian, pemerintah mendorong bahwa akan terjadi substitusi impor dengan *biofuel* atau biodiesel yang 100% itu sering disebut sebagai *green diesel*.

"Jadi, kita beralih dari bio 20% ke depannya jangka menengah, waktunya nanti pemerintah tentukan, menuju ke *green diesel*, 100% diesel. Dengan demikian kita menjadi mempunyai daya tahan atau kemandirian," terang Menperin seraya menambahkan, ini sepenuhnya dikerjakan di dalam negeri dengan mengoptimalkan bahan baku lokal.

Dengan menggunakan campuran biodiesel 100% diharapkan akan membawa dampak positif bagi perekonomian. upaya tersebut akan mempunyai efek positif yang berantai terhadap 17 juta petani dan 17 juta pekebun. "Jadi, inilah keberpihakan pemerintah agar kita terus mengembangkan ekonomi berbasis kemampuan sendiri," tegas Menperin.

Airlangga Hartarto adalah putra

dari Ir. Hartarto yang pernah menjabat Menteri Perindustrian pada Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) dan Kabinet Pembangunan V (1988-1993) dan Menteri Koordinator bidang Produksi dan Distribusi (Menko Prodis) pada Kabinet Pembangunan VI (1993-1998).

Dalam upaya peningkatan ekspor produk sawit, Airlangga Hartarto berpendapat supaya tarif pungutan sawit dapat diturunkan. Dia meminta Kementerian Keuangan yang menjadi induk Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit supaya merevisi tarif pungutan ekspor bagi produk minyak goreng. Tujuannya adalah memperkuat daya saing komoditas sawit di pasar global, selain itu mengantisipasi rencana Pemerintah Amerika Serikat melakukan review produk terhadap GSP Indonesia.

Menurutnya, nilai ekspor bisa ditingkatkan jika tarif pungutan ekspor produk sawit terutama minyak goreng dikurangi. Permintaan pun diajukan agar ekspor produk minyak goreng bisa ditingkatkan, baik secara kuantitas produksi maupun muatan dalam skala ekspor produk. (*)

REKAPITULASI DATA PRODUKSI ANGGOTA APRO

Januari

257,967 MT

217,925 MT

Februari

390,329 MT

192,774 MT

43,000 MT

Maret

390,349 MT

240,289 MT

22,786 MT

April

451,944 MT

283,495 MT

109,586 MT

Mei

564,014 MT

299,339 MT

66,550 MT

Juni

594,297 MT

189,524 MT

259,212 MT



PRODUKSI, DISTRIBUSI & EKSPOR BIOBI TAHAUN 2018



PRODUKSI, DISTRIBUSI & EKSPOR BIOBI TAHAUN 2018



BIODIESEL DAN ALOKASI BESARAN VOLUME

FAKOR NABATI JENIS BIODIESEL

- OKTOBER 2018



PENELITI WANITA RAIH PENGHARGAAN BJ HABIBIE TECHNOLOGY AWARD

Prof. Dr. Eng-Eniya Listiani Dewi, B.Eng., M.Eng., yang telah berhasil mengembangkan teknologi Fuel Cell dengan metode electron transfer. Yang menarik adalah proses produksi dikembangkan dari limbah biomassa berbahan limbah sawit.



Eniya Listiani Dewi menjadi peneliti wanita pertama yang berhasil meraih penghargaan BJ Habibie Technology Award ke-11 pada awal Juli 2018. Penghargaan BJHTA ditujukan kepada peneliti maupun periset teknologi yang berjasa pada bangsa dan negara. Penerimaanya memiliki reputasi nasional maupun internasional di bidang teknologi serta menghasilkan karya nyata dan inovasi luas.

Eniya Listiani Dewi dinobatkan sebagai peraih penghargaan ini karena mengembangkan teknologi Fuel Cell dengan metode electron transfer. Teknologi ini menggunakan bahan baku lokal dan dipasang pada motor juga back up power untuk berbagai peralatan. Proses produksi gas hidrogen telah dikembangkan dari limbah biomassa dengan bahan baku limbah dari industri kepala sawit.

Riset fuel cell telah dilakukan semenjak 2004, Eniya berhasil mewujudkan rekayasa teknologi sel bahan bakar (*fuel cell*). Dia melakukan rekayasa teknologi sehingga bisa menghasilkan sumber listrik yang ramah lingkungan.

Prof. Eniya Listiani yang berasal dari Magelang Jawa Tengah, menjelaskan hasil penelitiannya ini dapat dijadikan salah satu energi alternatif masa depan termasuk dalam pemenuhan kebutuhan listrik, bahan bakar kendaraan. Menariknya, sumber energi baru ini ramah lingkungan. Bahkan tidak menghasilkan polusi suara. Aplikasi Fuel Cell pada otomotif dikembangkan di sepeda motor hidrogen dengan kapasitas 500 W. Energi yang dihasilkan ini mampu digunakan pada 60 km/jam dengan konsumsi rata-rata 1 km/L hidrogen.

"Jadi, yang keluar dari knalpot motor berbahan bakar hydrogen ini yaitu air," ucap Eniya dalam wawancara dengan Majalah SAWIT INDONESIA.

Saat ini, sistem *Fuel Cell* inovasi Eniya Listiani Dewi sudah digunakan oleh perusahaan telekomunikasi di Indonesia untuk *back up power* yang dipasangkan pada *Base Transceiver Station* atau yang lebih dikenal BTS. Keunggulan energi power menggunakan Fuel Cell, tidak mengeluarkan suara dan emisi. Sangat berbeda dengan genset.

"Jika menggunakan genset yang dipasang di *roof top* ada getaran, tapi apabila menggunakan

Fuel Cell tidak ada getaran," terang lulusan Waseda University Jepang.

Selain aktif dalam penelitian, Eniya juga mempunyai jabatan penting di berbagai organisasi. Seperti Ketua Himpunan Polimer Indonesia 2017-2020. Ia juga pendiri dan President Association of Fuel Cell and Hydrogen Energy. Dan hingga kini menjabat sebagai Dewan Direksi Asosiasi Energi Hidrogen Internasional dan juga sebagai Indonesian Chapter Chair untuk APEC Research Center for Advanced Biohydrogen Technology (ACABT) karena penggunaan kelapa sawit sebagai energi.

Menteri Ristekdikti, M.Nasir menghimbau para peneliti dan akademisi untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dan menghasilkan inovasi sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas.

"Indonesia memiliki lebih dari 5.400 riset yang telah dipublikasikan, jumlah ini terus meningkat per Juli lalu. Saat ini kita telah mampu bersaing dengan negara tetangga seperti Thailand, Singapura dan Malaysia. Riset yang bermanfaat adalah riset yang dipublikasikan dan menghasilkan inovasi,"pungkasnya. (*)